

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Penelitian

Memasuki era perdagangan bebas, persaingan usaha di antara perusahaan-perusahaan semakin tajam. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan supaya dapat mempertahankan eksistensinya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui penggabungan usaha. Penggabungan usaha adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Penggabungan usaha pada umumnya dilakukan dalam bentuk: merger, akuisisi, dan konsolidasi (Latifah, 2003).

Terdapat perbedaan mendasar antara merger dan bentuk penggabungan usaha lainnya seperti akuisisi dan konsolidasi. Sartono (2008:365) menjelaskan merger merupakan kombinasi antara dua atau lebih perusahaan yang melebur menjadi satu perusahaan sedangkan akuisisi merupakan pengambilalihan perusahaan lain oleh sebuah perusahaan untuk dijadikan sebagai anak perusahaan atau digabungkan menjadi satu. Menurut Moin (2007:10), konsolidasi merupakan peleburan dua atau lebih perusahaan yang menyebabkan terbentuknya satu perusahaan yang sama sekali baru, dan perusahaan-perusahaan yang melebur akan bubar secara entitas hukum.

Tabel 1.1. Perbedaan Merger, Akuisisi dan Konsolidasi

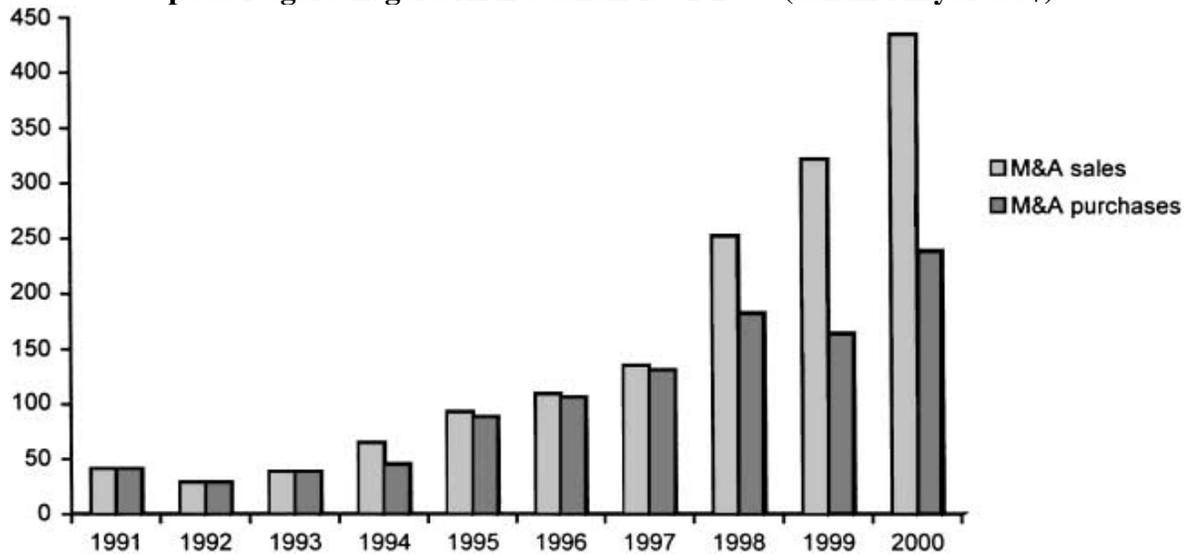
Istilah	Sebelum Kombinasi	Setelah Kombinasi
Merger	A dan B	A atau B
Akuisisi	A dan B	A dan B
Konsolidasi	A dan B	C

Sumber: Moin (2007:11)

Smith (1988:159) berpendapat bahwa terminologi merger dan akuisisi berkaitan erat dan seringkali digunakan bersamaan meskipun hasil akhir dari kedua aktivitas tersebut sangat berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kata merger dan akuisisi atau pengambilalihan (*takeover*) dianggap memiliki pengertian yang sama sehingga dapat dipertukarkan.

Sudah banyak yang mencatat bahwa banyak terjadi peningkatan yang dramatis pada aktivitas merger sejak pertengahan tahun 1990an, terutama pada negara-negara anggota APEC (Chen dan Findlay, 2003). Nilai penjualan Merger dan Akuisisi lintas-batas di negara-negara APEC meningkat dari US\$41 Milyar pada 1991 hingga mencapai US\$435 Milyar pada tahun 2000, terjadi peningkatan lebih dari 10 kali pada periode tersebut. Sementara itu, nilai pembelian lintas-batas di negara-negara APEC meningkat hingga sekitar lima kali lipat dari tahun 1991 sebesar US\$ 40 Milyar hingga mencapai US\$ 238 Milyar pada tahun 2000. Gambar 1.1 berikut memperlihatkan Aktivitas Merger dan Akuisisi Lintas Negara pada Negara-negara APEC tahun 1991-2000.

Gambar 1.1
Aktivitas Merger dan Akuisisi Lintas Negara
pada Negara-negara APEC tahun 1991-2000 (dalam Milyar US\$)



Sumber: UNCRTAD (2001)

Gelombang merger dan akuisisi pun melanda Jepang, yaitu antara Bank of Tokyo dan Mitsubishi Bank menjadi Bank of Tokyo-Mitsubishi pada tahun 1996 dengan nilai transaksi sebesar US\$579 Miliar pada bulan Juni 1996. Menanggapi krisis moneter yang melanda Asia pada 1997, Malaysia pun melakukan merger besar-besaran pada 54 Bank Swasta dan Pemerintah di sana menjadi 10 Bank. Di bawah merger yang diatur (oleh pemerintah) ini, Bank yang gagal diatur oleh Bank Sentral untuk bergabung dengan Bank yang lebih besar. Merger yang diatur oleh pemerintah (atau selanjutnya *guided merger*), banyak diyakini oleh sejumlah pembuat keputusan sebagai strategi untuk mengatasi masalah perbankan (Ahmad, Ariff, dan Skully, 2007).

Di India juga terjadi peningkatan aktivitas restrukturisasi perusahaan yang berakhir dengan kesepakatan merger. Pada tahun 2005, aktivitas merger mewarnai 88% kesepakatan industri di negara itu, yang meningkat dari hanya 69% dari tahun sebelumnya. Peningkatan aktivitas merger dan peran pentingnya dalam peningkatan ekonomi negara tersebut membuat studi mengenai faktor-faktor penyebab aktivitas merger menjadi penting untuk memberikan pengetahuan mengenai restrukturisasi sebuah perusahaan di negara berkembang (Agrawal dan Sensarma, 2006).

Di Indonesia, aktivitas merger banyak terjadi terutama pada industri perbankan setelah dikeluarkannya Paket kebijakan tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 tentang deregulasi perbankan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menggalakan kehidupan sektor keuangan umumnya dan industri perbankan. Kebijakan ini mencakup bidang keuangan, perbankan, maupun bidang moneter. Khusus yang berkaitan dengan kebijakan bidang perbankan antara lain diatur mengenai pemberian kemudahan dalam mendirikan bank dan lembaga keuangan bukan bank (Febryani dan Zulfadin, 2003).

Antara dikeluarkannya Pakto 88 hingga krisis moneter tahun 1997, telah terjadi beberapa kali penggabungan usaha di bidang perbankan, antara lain Bank Bali yang mengakuisisi Bank Dharma Usaha pada 1988, konsolidasi antara Bank Pasar Warga Nugraha, Bank Galuh Pakuan, Bank Pasar Ngliman, dan Bank Swadaya Harta yang membentuk Bank Dharmala pada 1989. Bank Anken yang mengakuisisi Bank Pasar Sinar Menara pada 1989 dan Bank Pasar Panca Sinar Dharma pada 1990, kemudian Bank Bumi Putra yang mengambil alih Bank Desa Bumi Harta pada 1990. Peleburan

usaha juga dilakukan pada tahun yang sama oleh Bank Swansarindo bersama Bank Pasar Gunung Sindoro dan Bank Pasar Kendeng (Budianto, 2004).

Krisis moneter tahun 1997 yang melanda Asia sangat berdampak pada kondisi perekonomian Indonesia. Hal tersebut menyebabkan Pemerintah Indonesia juga melakukan *guided merger* pada 4 (empat) bank pemerintah, yaitu Bank Ekspor-Import Indonesia (EXIM), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO), dan Bank Budi Daya (BBD). Keempat Bank ini kemudian tergabung dalam satu Bank baru dengan nama Bank Mandiri (Budianto, 2004). Selain Bank Mandiri, Pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) juga melakukan *guided merger* pada beberapa bank swasta Nasional di bawah pengawasannya yang kala itu berstatus *bank take over* (BTO)¹ (Mahardika, *et al.*, 2008).

Pada Agustus 1999, Bank PCFCI resmi bergabung dengan Bank Danamon. Meski demikian, saham Bank PCFCI baru delisting dari Bursa pada 4 Januari 2000². Merger tersebut dilanjutkan oleh bergabungnya Bank Tiara Asia, Bank Duta, Bank Nusa Nasional, Tamara Bank, Bank Pos Nusantara, Bank Rama, Bank RSI, dan Jaya Bank Internasional dengan Bank Danamon pada awal tahun 2000. Sepanjang sejarah penggabungan usaha di Indonesia, ini merupakan merger dengan skala terbesar yang pernah dilakukan (Mahardika, *et al.*, 2008).

Perjalanan merger bank nasional kemudian diteruskan dengan merger (konsolidasi) antara Bank Bali, Bank Universal, Bank Prima Ekspres, Bank Artha

¹ Termasuk dalam *bank take over* (BTO) yaitu bank yang akan melakukan penggabungan usaha.

² Berita dari: www.atimes.com/bizasia/BA06Aa01.html

Media, dan Bank Patriot ke dalam satu bendera, yaitu Bank Permata pada Oktober 2002 (Budianto, 2004). Selain itu, terdapat merger antara dua Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Chinkara Capital Ltd., yaitu Bank Danpac dan Bank Pikko. Dari merger ini, PT Bank Danpac Tbk menjadi *surviving company* (Annual Repport BAPEPAM-LK 2002). Pada tahun 2004 terdapat konsolidasi antara Bank Danpac, Bank Pikko dan Bank CIC ke dalam Bank Century, Tbk.

Menurut Iskandar (2007), pada tahun 2005 dan 2006 terdapat 2 (dua) bank yang melakukan penggabungan usaha, yaitu Bank Artha Graha dan Bank Inter-Pasific pada tahun 2005 dan Bank UFJ Indonesia serta The Bank of Tokyo-Mistubishi, Ltd. pada tahun 2006. Bank Artha Graha berhasil mendapatkan tender penjualan saham Bank Inter-Pasific setelah menyisihkan Konsorsium Trimegah Securities dan PT Mitra Pinasthika Mustika³. Pada tahun 2007, terdapat merger antara PT Bank Multicor Tbk dengan PT Bank Windu Kentjana yang kemudian berganti menjadi PT Bank Windu Kentjana International Tbk. Meskipun mengalami perubahan nama, kode perdagangan di bursa tetap memakai nama MCO⁴. Hingga saat ini, merger (konsolidasi) bank terakhir di Indonesia adalah antara Lippobank dan Bank Niaga pada Juni 2008 menjadi Bank OCBC Niaga⁵. Selengkapnya nama bank yang merger mulai tahun 2000-2008 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Salah satu alasan bank melakukan merger yaitu masih terdapatnya modal inti minimum yang belum memenuhi persyaratan Bank Indonesia (Iskandar, 2007).

³ Berita dari <http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=BwYMV1QPBFwF>

⁴ Berita dari <http://buletinbisnis.wordpress.com/2008/01/24/bank-multicor-gunakan-nama-baru/>

⁵ Berita dari <http://www.cimbniaga.com/index.asp?idm=11&id=NN00000334>

Menurut Iskandar, merger dan akuisisi akan banyak terjadi di kelas bank yang masih memiliki modal inti minimum di bawah Rp80 miliar.⁶ Jika bank-bank gagal dalam memenuhi target modal inti ini maka posisi mereka terancam turun menjadi bank dengan kegiatan terbatas. Bank dengan kegiatan terbatas tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan Bank Devisa, seperti aktivitas pemberian kredit untuk kegiatan ekspor-impor, dan lain-lain.

Tabel 1.2. Bank dengan Status Perusahaan Publik Yang Melakukan Merger Periode Tahun 2000-2008

Tahun	Induk	Target	Bentuk	Sumber Berita/Keterangan
2000	PT Bank Danamon	PT Bank PDFCI (PDFC) PT Bank Tiara Asia, (BNTA) PT Bank Duta, (BNDT) PT Bank Nusa Nasional, PT Tamara Bank, (TMBN) PT Bank Pos Nusantara, PT Bank Rama, PT Bank RSI, dan PT Jaya Bank Internasional	Merger	<u>Annual Report BAPEPAM-LK 2000</u>
2001	<i>Tidak ada data Bank Merger</i>			Tidak ada keterangan Merger Bank di Annual Report BAPEPAM-LK th 2001
2002	PT Bank Danpac	PT Bank Pikko (BNPK)	Merger	<u>Annual Report BAPEPAM LK-2002</u>
	PT Bank Permata	PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Arthamedia, PT Bank Patriot dan PT Bank Prima Express	Konsolidasi	<u>Infoanda dan terdapat keterangan pada Annual Report BAPEPAM LK-2002</u>

⁶ Modal inti minimum sebesar 80 miliar tersebut ditetapkan pada tahun 2007 (Iskandar, 2007). Besarnya modal inti minimum yang ditetapkan untuk periode sebelumnya tentu saja berbeda. Sebagai contohnya untuk tahun 1989, besarnya modal minimum yang ditetapkan sebesar Rp 100 juta. Penetapan ini dilakukan untuk menyempurnakan Paket Oktober 1988 (Pakto 88) yang pertama pada tanggal 25 Maret 1989 (Budianto, 2004).

Tabel 1.2. Bank dengan Status Perusahaan Publik Yang Melakukan Merger Periode Tahun 2000-2008 (Lanjutan)

2003	<i>Tidak ada data Bank Merger</i>			Tidak ada keterangan Merger Bank pada Annual Report BAPEPAM-LK th 2003
2004	PT Bank Century (BCIC)	PT Bank Danpac (BDPC) PT Bank Pikko (BNPK) PT Bank CIC (BCIC)	Konsolidasi	Bisnis.com , terdapat keterangan pada Annual Report BAPEPAM-LK 04
2005	Bank Artha Graha	PT Bank Inter-Pasific (INPC)	Akuisisi	Infoanda
2006	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ	Bank UFJ Indonesia serta The Bank of Tokyo-Mistubishi, Ltd.	Konsolidasi	Infoanda , namun tidak ada keterangan merger pada Annual Report BAPEPAM-LK th 2006
2007	PT Bank Windu Kentjana International Tbk	PT Bank Multicor Tbk (MCOR) PT Bank Windu Kencana	Akuisisi	Detik , tercatat pada Annual Report BAPEPAM-LK '07
2008	PT Bank CIMB Niaga Tbk	PT Bank Niaga Tbk (BNGA) PT Bank Lippo Tbk (LPBN)	Konsolidasi	Wikipedia

Ahmad, Ariff dan Skully (2007) dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya merger di sektor perbankan Malaysia menyatakan bahwa motif utama Bank melakukan merger dan akuisisi adalah untuk memaksimalkan *shareholder value*. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kekuatan pasar, efisiensi dan diversifikasi resiko Bank. Pihak manajerial juga dapat mengejar kepentingan tersendiri melalui merger dengan cara mengurangi resiko pekerjaan yang tidak terdiversifikasi. Baik pemegang saham maupun pihak manajerial dapat melakukan merger sebagai alat untuk meningkatkan akses Bank

untuk mendapatkan jaminan keamanan pemerintah seperti asuransi deposito, dan lain-lain.

Menurut Rachmawati dan Tandelilin (2001), alasan utama perusahaan di Indonesia melakukan penggabungan usaha pada dasarnya adalah untuk menghemat pajak. Perusahaan-perusahaan yang mengakuisisi perusahaan target dengan tujuan menghemat pajak terutama dilakukan oleh perusahaan besar yang kelebihan kas. Namun ada juga perusahaan yang melakukan akuisisi dengan tujuan *back door listing*⁷. Cara ini merupakan upaya yang paling efisien dan tidak berbelit-belit bagi perusahaan yang belum *go-public* untuk menjadi perusahaan publik. Perusahaan tersebut akan menikmati fasilitas sebagai perusahaan publik tanpa melewati prosedur yang rumit di BAPEPAM.

Sehubungan dengan perusahaan target, Andrade, et al. (2001) menemukan bahwa perusahaan akuisitor cenderung untuk membeli perusahaan lain dengan nilai q yang lebih rendah. Lebih dari dua per tiga aktivitas merger dan akuisisi sejak tahun 1973 menunjukkan bahwa nilai q perusahaan target lebih rendah daripada perusahaan pengakuisisi (lihat tabel 1.3).

⁷ *Back door listing* adalah *go public* atau pendaftaran saham tanpa melakukan IPO dari anak perusahaan yang diakuisisi oleh perusahaan publik. (Rachmawati dan Tandelilin,2001)

Tabel 1.3. Statistik Deskriptif Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Merger (1973-1998)

Characteristics and Descriptive Statistics by Decade, 1973-1998				
	1973-1979	1980-1989	1990-1998	1973-1998
N	789	1,427	2,040	4,256
All Cash	38.3%	45.3%	27.4%	35.4%
All Stock	37.0%	32.9%	57.8%	45.6%
Any Stock	45.1%	45.6%	70.9%	57.6%
Hostile Bid at Any Point	8.4%	14.3%	4.0%	8.3%
Hostile Bid Successful	4.1%	7.1%	2.6%	4.4%
Bidders / Deal	1.1	1.2	1.0	1.1
Bids / Deal	1.6	1.6	1.2	1.4
Own Industry	29.9%	40.1%	47.8%	42.1%
Premium (Median)	47.2%	37.7%	34.5%	37.9%
Acquirer Leverage > Target Leverage	68.3%	61.6%	61.8%	62.9%
Acquirer Q > Target Q	68.4%	61.3%	68.3%	66.0%
Relative Size (Median)	10.0%	13.3%	11.2%	11.7%
Fraction of Acquirer Announcement Returns <-5%	14.9%	17.0%	19.4%	17.5%
Fraction of Acquirer Announcement Returns >5%	9.6%	11.3%	10.7%	11.1%

Sumber: Andrade, et. al, 2001

Berbeda dengan penelitian Agrawal dan Sensarma (2007) yang terfokus pada level industri, penelitian ini terfokus pada level sektor industri perbankan saja. Untuk sebutan pada variabel seperti Modal Disetor, Tobin's Q, dan Ukuran Perusahaan sudah dianggap tepat mengingat istilah ini berlaku universal baik untuk industri perbankan maupun bukan termasuk dalam industri non-perbankan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berniat untuk melakukan penelitian empiris yang berkaitan dengan fenomena merger dengan judul: "Prediksi Modal Disetor, Rasio-Q, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kemungkinan Bank Melakukan Merger: Studi Empirik Terhadap Perusahaan Publik Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2000-2008".

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah disebutkan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Berapa besarnya akurasi/ketepatan pengelompokkan bank-bank yang melakukan penggabungan usaha dan yang tidak melakukan penggabungan usaha berdasarkan modal inti minimum?
- 2) Berapa besarnya akurasi/ketepatan pengelompokkan bank-bank yang melakukan penggabungan usaha dan yang tidak melakukan penggabungan usaha berdasarkan rasio-Q?
- 3) Berapa besarnya akurasi/ketepatan pengelompokkan bank-bank yang melakukan penggabungan usaha dan yang tidak melakukan penggabungan usaha berdasarkan ukuran perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah teridentifikasi di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

- 1) Mengetahui berapa besarnya akurasi/ketepatan pengelompokkan bank-bank yang melakukan penggabungan usaha dan yang tidak melakukan penggabungan usaha berdasarkan modal inti minimum?
- 2) Mengetahui berapa besarnya akurasi/ketepatan pengelompokkan bank-bank yang melakukan penggabungan usaha dan yang tidak melakukan penggabungan usaha berdasarkan rasio-Q?

- 3) Mengetahui berapa besarnya akurasi/ketepatan pengelompokkan bank-bank yang melakukan penggabungan usaha dan yang tidak melakukan penggabungan usaha berdasarkan ukuran perusahaan?

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis.

- 1) Kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor dan emiten dalam membuat keputusan dan kebijakan strategis perusahaan, terutama dalam hal penggabungan usaha.
- 2) Kegunaan Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dalam mengembangkan model penelitian mengenai faktor-faktor penentu merger, baik dalam sektor industri perbankan maupun sektor industri lainnya di luar perbankan.